

Nama: Intan Ruliana

NPM: 2313031016

“Reformasi Pembiayaan Pendidikan di Provinsi Nusantara Raya”

1) Analisis Struktur Pengeluaran

Menurut saya, struktur pengeluaran pendidikan di Provinsi Nusantara Raya belum dapat dikatakan efektif karena besarnya anggaran yang dikeluarkan belum menghasilkan kualitas pendidikan yang baik. Hal ini terlihat dari skor literasi dan numerasi yang masih berada di bawah rata-rata nasional. Anggaran pendidikan yang mencapai 22% dari APBD belum mampu menghasilkan output pendidikan yang optimal. Alokasi dana sebesar 68% untuk gaji dan tunjangan guru sebenarnya penting, tetapi perlu diimbangi dengan program yang secara langsung meningkatkan kualitas pembelajaran. Saya menilai alokasi untuk infrastruktur digital sebesar 12% masih terlalu rendah mengingat perkembangan teknologi yang semakin pesat. Dana bantuan siswa sebesar 8% juga perlu ditingkatkan agar siswa dari keluarga kurang mampu dapat memperoleh akses pendidikan yang lebih baik. Sebagian anggaran administrasi dan belanja yang kurang produktif dapat dialihkan untuk pengembangan teknologi pendidikan, pelatihan guru, dan bantuan pendidikan bagi siswa yang membutuhkan.

2) Analisis Sumber Pembiayaan

Saat ini pembiayaan pendidikan masih didominasi oleh pemerintah daerah. Kondisi ini menyebabkan ruang pengembangan pendidikan menjadi terbatas apabila terjadi penurunan kemampuan fiskal daerah. Perlu adanya sumber pendanaan tambahan yang tetap menjaga prinsip pemerataan pendidikan. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah membangun kerja sama dengan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Dana CSR dapat diarahkan untuk penyediaan laboratorium komputer, akses internet sekolah, maupun beasiswa bagi siswa berprestasi. Pemerintah daerah juga dapat menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga donor pendidikan untuk mendukung berbagai program peningkatan mutu pendidikan. Dengan adanya berbagai sumber pembiayaan, beban APBD dapat berkurang dan pembangunan pendidikan dapat berjalan lebih optimal.

3) Perbandingan dengan Negara OECD

Beberapa praktik negara OECD yang menurut saya realistis diterapkan adalah penggunaan data sebagai dasar pengambilan keputusan dan pemberian anggaran berdasarkan kebutuhan sekolah. Sekolah yang berada di daerah terpencil dan memiliki keterbatasan fasilitas seharusnya memperoleh alokasi dana yang lebih besar dibandingkan sekolah yang sudah maju. Peningkatan kompetensi guru juga perlu menjadi prioritas utama. Negara-negara OECD umumnya menempatkan kualitas guru sebagai faktor terpenting dalam peningkatan mutu pendidikan. Penerapan sistem tersebut di Indonesia menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, kualitas data pendidikan yang belum merata, serta perbedaan kondisi geografis antar daerah. Perubahan sistem pembiayaan membutuhkan komitmen dan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

4) Rancangan Reformasi Pembiayaan (5 Tahun)

Selama lima tahun ke depan, reformasi pembiayaan pendidikan di Nusantara Raya dapat dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, melakukan penyesuaian struktur belanja dengan meningkatkan alokasi untuk digitalisasi sekolah dan bantuan siswa, tanpa mengurangi hak guru. Pemerintah dapat melakukan pemerataan distribusi guru agar tidak terjadi penumpukan di wilayah perkotaan. Kedua, meningkatkan kualitas guru melalui pelatihan rutin, sertifikasi kompetensi, dan pemberian insentif bagi guru yang bersedia mengajar di daerah terpencil. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah. Ketiga, mempercepat digitalisasi sekolah melalui penyediaan jaringan internet, perangkat komputer, dan platform pembelajaran digital yang dapat digunakan oleh guru maupun siswa. Keempat, membangun sistem monitoring dan evaluasi berbasis data. Setiap sekolah diwajibkan melaporkan perkembangan hasil belajar siswa, penggunaan anggaran, serta kondisi sarana prasarana secara berkala. Data tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam menentukan kebijakan dan alokasi anggaran pada tahun berikutnya. Melalui reformasi tersebut, diharapkan kualitas pendidikan di Provinsi Nusantara Raya dapat meningkat, kesenjangan antarwilayah berkurang, dan penggunaan anggaran pendidikan menjadi lebih efektif serta tepat sasaran.

